

# BAB I PENDAHULUAN

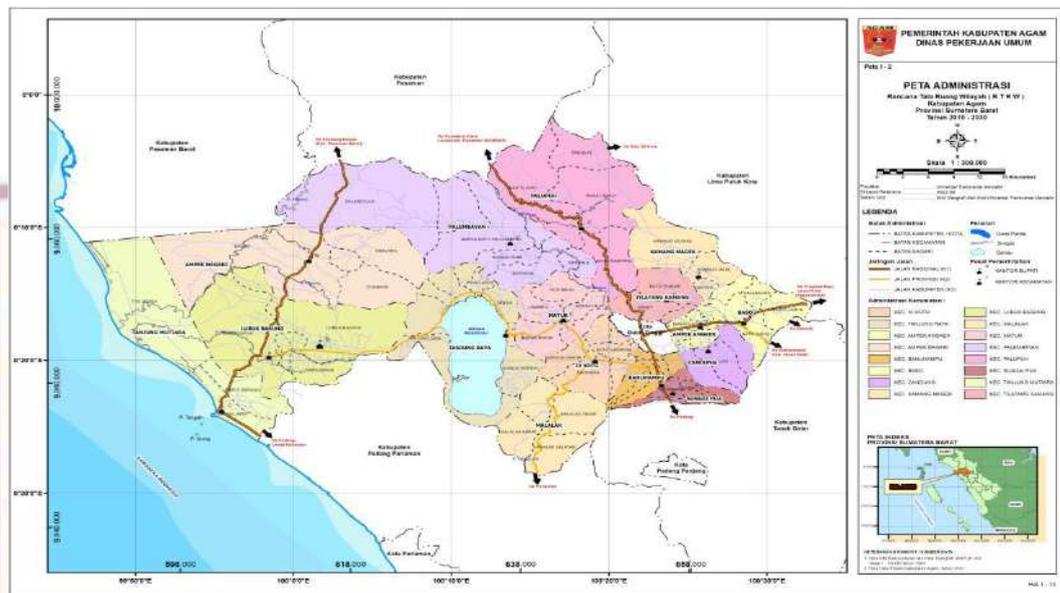
## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lubuk Basung. Secara astronomis Kabupaten Agam terletak pada  $00^{\circ}01'34''$ - $00^{\circ}28'43''$  Lintang Selatan dan  $99^{\circ}46'39''$ - $100^{\circ}32'50''$  Bujur Timur. Secara historis, pembentukan wilayah Kabupaten Agam ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, batas wilayah Kabupaten Agam ditetapkan berdasarkan pasal 1 surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 Nomor 10/G.M./S.T.G./49, setelah dikeluarkan sebagian dari daerah tersebut untuk memperluas daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 17 Desember 1949 Nomor 167/G.M./S.T.G./49 jo. ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 9 Juni 1947 Nomor 391. Penetapan batas wilayah tersebut kemudian menjadikan Kota Bukittinggi sebagai bagian enclave yang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Agam (Pemerintah Kabupaten Agam, 2021a).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, luas wilayah administrasi Kabupaten Agam lebih kurang 222.589 hektar atau 2.225,89 km<sup>2</sup> dengan batas administratif wilayah sebagai berikut (Pemerintah Kabupaten Agam, 2021b):

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Peta administrasi wilayah Kabupaten Agam dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



**Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Agam**

Pembangunan Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi suatu daerah. Jalan merupakan prasarana urat nadi dalam mendukung laju aktifitas perekonomian. Jalan merupakan infrastruktur angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara suatu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya (Hidayat, 2022b)

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Kondisi jalan yang baik juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya, disamping disebabkan oleh faktor pengemudi juga dipengaruhi oleh kondisi jalan yang ada (Hidayat, 2022a)

Prasarana transportasi jalan yang setiap waktu terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas perkerasan jalan sebagaimana indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural dan fungsionalnya yang mengalami kerusakan (Wicaksono & Mahardi, 2013).

Evaluasi kondisi perkerasan jalan perlu dilakukan untuk monitoring seberapa tingkat kerusakan yang terjadi pada suatu ruas jalan. Untuk dapat menentukan tingkat kerusakan dan usulan perbaikan diperlukan suatu metode yang memberikan pedoman dalam melakukan survei kondisi kerusakan perkerasan jalan secara visual, analisis terhadap kerusakan, dan mengklasifikasikannya. Hasil yang didapat membantu penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan (Wicaksono & Mahardi, 2013).

Ruas jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Agam saat ini masih banyak yang rusak dan sempit, untuk itu perlu dilakukan peningkatan layanan jalan. Ditengah kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, hal ini berdampak terhadap efisiensi dana transfer ke daerah. Pemerintah Kabupaten Agam salah satu daerah yang terdampak efisiensi anggaran tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu menyusun strategi dalam melaksanakan pemeliharaan jalan di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini (Presiden Republik Indonesia, 2025) .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi eksisting jalan kabupaten saat ini?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten?
3. Bagaimana strategi pemeliharaan jalan kabupaten dapat dioptimalkan dengan kondisi keterbatasan anggaran saat ini?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis kondisi aktual jalan kabupaten.
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.
3. Merumuskan rekomendasi strategi pemeliharaan jalan yang efektif dan efisien, ditengah kondisi efisiensi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Agam.

#### 1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada ruas jalan kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Agam.
2. Pemeliharaan jalan yang dikaji mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rekonstruksi jalan.
3. Pemeliharaan jalan yang dikaji hanya pada perkerasan jalan hotmix.
4. Analisis dilakukan berdasarkan anggaran pemeliharaan yang tersedia dari dana APBD Kabupaten Agam.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyusun skala prioritas pemeliharaan jalan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
2. Bagi lingkungan akademis khususnya mahasiswa, dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian yang terkait dengan pemeliharaan jalan.

